



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 235/18122008
HARI : KAMIS
TANGGAL : 18 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	Abhisit Pilih Menteri Kompeten	3
	RI rejects U.S. anti-piracy proposal	3
	11 ABK Indonesia Disandera Bajak Laut	4
	PPATK-Brunei Kerjasama Pertukaran Informasi Keuangan	5
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	DPR tolak RUU Jaring Pengaman Keuangan	6
	Persiapan Pemilu: KPU Tak Berdaya Kelola Pemilih Luar Negeri	6
	B. EKONOMI	
	Indonesia Pangkas Ekspor Karet	7
	Pemerintah Sambut Baik Kebijakan The Fed	7
	Bank Dunia Minta PNPM Dilakukan Permanen	7
	BKPM: Investor Timteng Target Utama Pemerintah	8
	RI Belum Siap Terapkan CPKB	9
	C. SOSBUD	
	Kualitas Hidup Petani Menurun: Liberalisasi Pertanian Sengsarakan Petani	10

	D.	HANKAM	--
	E.	HUKUM	
		RUU Penerbangan Disetujui DPR: Maskapai harus Mempunyai Lima Pesawat	11
		PENDIDIKAN UU BHP Disahkan di Tengah Kecamatan	12
	F.	OLAHRAGA	--
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	
		Enam Menlu Dipastikan Hadir pada CTI Summit di Manado	14
	III.	ARTIKEL	
		Perubahan Iklim dan Kita (Oleh Ivan A Hadar)	14
		The day the door to China opened wide (by Richard Holbrooke)	16
	IV.	LAIN-LAIN	--
	V.	EDITORIAL	
		Sepatu untuk Bush	17
		Klan Kennedy dan Nepotisme	18

Jakarta, 18 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. Abhisit Pilih Menteri Kompeten

Perdana menteri baru Thailand Abhisit Vejjajiva berjanji akan memilih menteri-menteri yang profesional untuk membawa negara itu keluar dari krisis.

Dia bertekad, kabinet yang dipimpinnya akan menyelesaikan krisis politik dan ekonomi di Negeri Gajah Putih tersebut. "Saya akan melakukan yang terbaik untuk menempatkan orang yang tepat pada tugasnya," ujar jebolan Universitas Oxford ini.

"Saya perlu meyakinkan semua orang bahwa saya akan memilih orang-orang yang kompeten untuk melaksanakan kebijakan- kebijakan yang rumit demi menyelamatkan negara kami," imbuhnya. Tim kabinet Abhisit rencananya bakal diumumkan ke publik pada hari ini karena PM kelahiran Inggris itu baru diberi restu memerintah oleh Raja Thailand Bhumibol Adulyadej kemarin malam.

Publik Thailand memprediksi menteri keuangan bakal dijabat Korn Chatikavanij, mantan manajer bank investasi JPMorgan Chase dan wakil pemimpin Partai Demokrat. Korn yang satu kampus bersama Abhisit di Oxford menyatakan siap menduduki posisi itu. Abhisit mengatakan, pospos dalam kabinetnya akan dibagi antara Partai Demokrat dan mitra koalisinya.

Mitra koalisi Demokrat merupakan para pembelot dari Partai Puea Thai yang merupakan jelmaan dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang telah dibubarkan. Sementara itu, Abhisit meminta maaf atas pencitraan buruk yang terjadi selama satu pekan pendudukan Bandara Internasional Suvarnabhumi dan Bandara Domestik Don Mueang oleh ribuan pendukung Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD).

"Saya kecewa terhadap insiden tersebut dan tidak memperbolehkan lagi kejadian tersebut terulang," pintanya karena insiden itu mengakibatkan 350.000 penumpang terjebak di dalam bandara. Dia menuturkan, industri pariwisata sangat terpuakul atas aksi demonstrasi dan kerugian besar yang timbul. Karena itulah, Abhisit berjanji menciptakan kesatuan dan rekonsiliasi nasional.

Di sisi lain, para loyalis PM Thaksin Shinawatra bertekad kembali turun ke jalan untuk menentang pemerintahan Abhisit. Menurut Chinawat Haboonpad, salah satu pemimpin "kaus merah" atau kelompok loyalis mantan PM Thaksin Shinawatra, ribuan orang bakal berkumpul di Bangkok dan menggelar pawai menuju parlemen.

"Kita akan berdemonstrasi di parlemen ketika Abhisit menyampaikan pidato program-program pemerintah pada pekan depan," ujar Chinawat. "Kita ingin pemerintah membubarkan parlemen sama seperti pemerintah yang telah merebut kekuasaan dari rakyat," imbuhnya.

Menurut Deputi Kepala Polisi Metropolitan Mayor Jenderal Ekkarat Mee-precha, sedikitnya 30.000 orang diperkirakan bakal menggelar protes di depan parlemen ketika pemerintahan Demokrat mengumumkan kebijakannya pada akhir bulan ini. Mee-precha mengatakan polisi telah menyiapkan berbagai strategi agar tidak terjadi kerusuhan. Dia menjamin situasi bakal terkendali dan insiden kerusuhan pada 7 Oktober tidak bakal terulang. "Polisi hanya akan bertahan," ujarnya.

Sebelumnya, pada Senin (15/12), sekitar 200 loyalis Thaksin menggelar demonstrasi ketika pemilihan PM di parlemen. Mereka menyatakan terpilihnya Abhisit sebagai "kudeta diam-diam". Mereka melempari barikade penjaga di pintu gerbang dan menghentikan anggota parlemen yang meninggalkan gedung. Berikutnya, pada Selasa (16/12), sekitar 500 pendukung Thaksin juga menggelar unjuk rasa di Taman Sanam Luang, Bangkok. (Koran Sindo)

2.RI rejects U.S. anti-piracy proposal

Indonesia has rejected a U.S. proposal at the UN Security Council for UN authorization to pursue pirates ashore in Somalia, citing its implications for Indonesia and key straits within its territory, a Foreign Ministry official said Tuesday.

The council is expected to decide Tuesday (Wednesday in Jakarta) on the matter as countries begin to take stronger measures to deal with rampant piracy off the Somali coast.

Pirates there have enjoyed a bumper 2008, attacking more than 100 ships and raking in around US\$120 million in ransoms.

The U.S. proposal says law enforcement against piracy at sea must include related activities conducted on land, said Arief Havas Oegroseno, the ministry's director general for legal and international treaties.

Although the proposal applies solely to Somalia, Havas said the draft resolution was loosely worded, raising fears it could be generalized in future for application in other jurisdictions.

He argued this scenario could affect Indonesia, which manages three of the world's 13 major straits -- the Malacca, Lombok and Sunda straits.

"We are hoping a consensus can be reached on this matter. But if not, we will seek a vote," Havas added.

The Malacca Strait is one of the most important shipping lanes in the world, allowing 70,000 ships carrying a quarter of the world's traded goods, including oil, to pass through each year.

Piracy there has faded rapidly since 2006, following coordinated patrols by border states Indonesia, Malaysia and Singapore.

China, one of the five veto-wielding members of the Security Council, has also expressed reservations over the U.S. proposal.

AP reports that China's UN Ambassador Zhang Yesui said China wanted "increased international cooperation to fight piracy, but on the other hand we would also like to emphasize that the political process... must be handled as well".

U.S. Secretary of State Condoleezza Rice, in an interview on Monday with AP, said she would push for the proposal during her visit to the UN on Tuesday, insisting the U.S. was united behind the idea that any force, U.S or otherwise, might need to take on pirates under "hot pursuit" on land.

Indonesia is an elected non-permanent member of the Security Council; its two-year term expires at the end of this month. (The Jakarta Post)

3.11 ABK Indonesia Disandera Bajak Laut

Sebanyak 11 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia disandera saat kapal mereka diambil alih bajak laut Somalia.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah menegaskan, 11 ABK tersebut bekerja pada kapal tongkang milik pengusaha Malaysia. Dia mengatakan, kapal tersebut dibajak di Yaman pada Selasa (16/12) lalu oleh para perompak dari Somalia. "Kapal tongkang bersama ABK-nya pun dibawa ke Somalia,"ujarnya kepada SINDO kemarin.

Faizasyah mengatakan, Deplu telah menghubungi Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Rais Yatim. Menurut Faizasyah, Menlu Malaysia telah mengonfirmasi dan menghubungi pengusaha pemilik kapal tongkang tersebut. "Pemilik kapal telah berkomunikasi dengan para perompak. Dilaporkan para ABK dari Indonesia tersebut dalam keadaan sehat dan aman,"paparnya.

Namun, belum bisa dijelaskan nama-nama para ABK kapal tongkang tersebut. "Soal asal mereka, belum bisa kita dapatkan. Tetapi pihak Kedubes Malaysia berjanji akan secepatnya memberikan informasi. Paling lambat, besok siang (hari ini) sudah ada informasi yang akurat soal namanama mereka tersebut,"paparnya.

Faizasyah mengaku mendapatkan informasi adanya ABK Indonesia yang ditahan pembajak pada pukul 23.00 WIB pada Selasa (16/12) dari pihak Malaysia. "Kita minta KBRI di Kuala Lumpur untuk memverifikasi kabar tersebut dan kita mendapat kepastian subuh tadi bahwa ada 11 ABK WNI di kapal yang dibajak itu," ungkap Faizasyah.

Bagaimana mengenai uang tebusan? Faizasyah mengaku belum mengetahui perundingan uang tebusan antara pemilik kapal dan para pembajak. "Sampai sekarang belum ada permintaan berapa uang tebusan,"katanya. Hingga saat ini, Faizasyah belum mengetahui kelompok yang bertanggung jawab di belakang aksi pembajakan dan penyanderaan ABK Indonesia.

"Banyak sekali kelompok perompak di wilayah tersebut. Kita masih mencari kejelasan," ujar Faizasyah. Dikarenakan Indonesia tidak memiliki perwakilan diplomatik di Somalia, Faizasyah menjelaskan, pihak Deplu melakukan kontak melalui perwakilannya di Addis Ababa dan Kenya.

"Kita telah melakukan kontak dengan penjaga pantai yang menangani masalah ini. Informasi terakhir, kapal yang dibajak itu dibawa ke perairan Somalia," kata Faizasyah. Perwakilan Indonesia di Kenya sudah berhubungan dengan perwakilan pemerintahan transisi Somalia.

Deplu juga meminta bantuan dari perwakilan Somalia di Indonesia untuk memonitor dari kelompok mana pelaku pembajakan tersebut. "Memang belum banyak yang bisa diharapkan karena negara Somalia sekarang ini sedang dilanda konflik sehingga efektivitas pemerintahan Somalia memang tengah dipertanyakan," jawabnya.

Menyinggung tentang motif pembajakan, Faizasyah mengaku belum menerima laporan permintaan spesifik yang disampaikan oleh pembajak. Namun berdasarkan pengalaman, dia mengatakan setiap pembajakan pasti berujung pada permintaan kompensasi dalam bentuk uang tebusan.

"Biasanya, pembajak meminta uang pengganti makanan atau sejenisnya. Tetapi untuk kali ini, belum ada informasi soal tebusan dan belum ada nilai dari tebusan yang diminta pembajak," imbuhnya. Menyinggung tentang langkah-langkah pembebasan, Faizasyah tidak terlalu berharap dari pemerintahan Somalia yang sedang dalam kondisi tidak stabil.

Solusinya adalah bekerja sama dengan pemilik kapal yang merupakan warga negara Malaysia sehingga bisa melakukan langkah-langkah koordinasi." Kita juga akan melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak yang terkait sehingga semua langkah yang ditempuh terukur dan efektif," ujarnya.

Kapal tongkang tempat bekerja 11 ABK Indonesia itu sebenarnya disewa perusahaan minyak Prancis, Total. Mereka dibajak bersama sebuah kapal kargo Turki, Bosphorus Prodigy, Selasa (16/12). Menurut Koordinator Bantuan Program Kelautan dan Pelayaran Afrika Timur Andrew Mwangura, kapal tongkang tersebut dibajak ketika sedang berlayar menuju Malaysia.

Kevin Church, juru bicara perusahaan minyak Total di Paris, Prancis, membenarkan telah terjadi pembajakan kapal milik salah satu subkontraktor yang secara tetap bekerja sama dengan perusahaan mereka. Sebagian besar tawanan adalah anak buah kapal berpaspor Indonesia.

Kapal itu berangkat dari pelabuhan Yaman, Mukalla menuju Malaysia." Sepertinya kapal yang dibajak tidak membawa minyak," kata Church. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat mengesahkan satu resolusi yang menyeru masyarakat internasional untuk secara aktif terlibat dalam perang melawan perompak.

DK PBB juga menyetujui serangan lewat darat terhadap para perompak tersebut. Resolusi yang dirancang AS itu adalah yang keempat yang disahkan oleh DK PBB sejak Juni, dengan tujuan meningkatkan perang internasional melawan perompak Somalia. (Koran Sindo)

4. PPATK-Brunei Kerjasama Pertukaran Informasi Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menjalin kerjasama dengan Divisi Keuangan Kementerian Keuangan Brunei Darussalam untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui pertukaran informasi intelijen keuangan.

Wakil Kepala PPATK Bidang Administrasi, Wahyu Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (18/12) menyebutkan, Kepala PPATK Yunus Husein bersama Director Financial Institutions, Financial Institutions Division, Ministry of Finance Brunei Darussalam, Rosni Hj Tungkat menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerjasama itu di Jakarta, Rabu (17/12).

MoU itu merupakan upaya memperkuat kerjasama internasional yang dilakukan ke dua negara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, khususnya dalam hal tukar menukar informasi intelijen keuangan. Dengan adanya ikatan seperti ini diharapkan dapat lebih mempermudah pertukaran informasi.

Esensi dari perjanjian kerjasama tersebut antara lain, kedua negara sepakat untuk melakukan pertukaran informasi intelijen keuangan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lainnya yang terkait dengan kedua tindak pidana tersebut.

Informasi yang dipertukarkan bersifat rahasia dan merupakan kewajiban masing-masing lembaga untuk menjaga kerahasiannya, tidak dapat dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan, tidak dapat diteruskan kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari pemilik

informasi, serta masing-masing lembaga dapat menolak untuk memberikan informasi yang diminta apabila bertentangan dengan kepentingan negara masing-masing.

Dari sisi hukum Indonesia, kerjasama yang dilakukan merupakan implementasi dari Pasal 25 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU) yang mengatur, bahwa PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat melakukan kerjasama dengan pihak yang terkait, baik nasional maupun internasional.

Kerjasama dengan lembaga intelijen keuangan (*financial intelligent unit/FIU*) Brunei Darussalam merupakan kerjasama luar negeri yang ke 28. Sebelumnya PPATK telah melakukan kerjasama dengan FIU negara-negara lainnya termasuk FIU Amerika Serikat.

Sampai dengan November 2008, PPATK telah melakukan pertukaran informasi dengan FIU lain sebanyak 261 kali. Dengan rincian, penerimaan informasi dari FIU lain atas dasar permintaan PPATK sebanyak 135 kali, Pemberian informasi kepada FIU lain atas dasar permintaan FIU sebanyak 109 kali, Penerimaan informasi dari FIU lain secara spontan sebanyak 13 kali dan Pemberian informasi kepada FIU lain secara spontan sebanyak 4 kali.(Media Indonesia)

I . NASIONAL :

A. POLITIK :

1. DPR tolak RUU Jaring Pengaman Keuangan

DPR menolak Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan dan meloloskan RUU tentang Bank Indonesia dan RUU tentang Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjadi Undang-Undang.

Ketua DPR Agung Laksono mengungkapkan seluruh fraksi menerima pengajuan RUU tentang BI dan RUU LPS untuk menjadi Undang-Undang, kecuali RUU JPSK.

"Untuk itu sebelum 19 Januari pemerintah harus mengajukan RUU JPSK baru melalui mekanisme yang berlaku," ujar Ketua DPR Agung Laksono dalam Rapat Paripurna DPR, hari ini.

Dalam rapat paripurna tersebut, empat fraksi dengan tegas menolak RUU JPSK, terdiri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR).

Sementara, Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) belum dapat menyetujui, sedangkan empat fraksi lainnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Damai sejahtera menerima dan menyetujuinya.

Dalam rapat pandangan akhir fraksi Komisi XI DPR semalam, FPPP dan FPDS meminta waktu untuk mendalami sehingga belum bisa memutuskan. Sedangkan sisanya mempertahankan pandangannya atas RUU JPSK. (Bisnis Indonesia)

2. Persiapan Pemilu: KPU Tak Berdaya Kelola Pemilih Luar Negeri

Tidak semua pemilih di luar negeri mampu diakomodasi dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2009. Hal tersebut, antara lain, diakibatkan ketidakpastian jumlah potensi pemilih pemilu di luar negeri, keterlambatan pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri, terlambatnya pencairan anggaran, serta kendala geografis dan kultur di setiap negara.

"KPU tak berdaya untuk mengelola semua pemilih yang ada di luar negeri," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dalam diskusi "Mendorong Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran dalam Pemilu 2009" di Jakarta, Rabu (17/12).

Menurut Hafiz, informasi dari pejabat Departemen Luar Negeri menyebutkan ada sekitar 13,5 juta warga Indonesia di luar negeri. Mereka, di antaranya, tersebar di Malaysia sebanyak lebih dari 2 juta orang dan di Arab Saudi sekitar 900.000 orang.

"KPU sejak awal sudah gelisah, bagaimana bisa menjangkau semua pemilih itu. Bagi KPU, suara pemilih di luar negeri sama berharganya dengan pemilih di dalam negeri," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyebutkan, data Deplu pada November 2008 menunjukkan jumlah buruh migran berdokumen asal Indonesia mencapai 3.140.366 orang. Jika digabung dengan mereka yang bekerja tanpa memiliki dokumen resmi mencapai 6,5 juta orang.

Hafiz menambahkan, PPLN di 117 negara baru dibentuk antara Agustus hingga Oktober. Akibatnya, mereka tidak dapat bekerja dengan baik karena kurangnya koordinasi dengan KPU. Wilayah yang luas juga membuat kesulitan mendata semua pemilih.

Walau sudah dipermudah, jumlah pemilih yang terjangkau tetap sangat sedikit. Menurut Hafiz, Deplu sudah meminta KPU agar pendaftaran pemilih luar negeri diperpanjang hingga akhir Desember. Namun, hal itu tidak dapat diakomodasi karena justru akan mengganggu tahapan pemilu lainnya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Wirnyaningsih, mengakui penyelenggaraan pemilu di luar negeri banyak menghadapi kendala. Namun, berbagai persoalan yang terjadi bukanlah murni kesalahan KPU, seperti terlambatnya pencairan anggaran.

Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform Hadar N Gumay mengatakan, waktu pemungutan suara yang bertepatan dengan hari kerja diperkirakan akan membuat pemilih di luar negeri kurang antusias mendatangi tempat pemungutan suara. (Kompas)

B. EKONOMI

1. Indonesia Pangkas Ekspor Karet

NEGARA-negara produsen, termasuk Indonesia, berencana memangkas ekspor karet pada triwulan I/2009. Kebijakan ini diharapkan dapat mendongkrak kembali harga karet di pasar internasional yang anjlok akibat turunnya permintaan, seiring krisis ekonomi global.

Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Suharto Honggokusomo mengatakan, pengurangan ekspor sesuai kesepakatan yang diambil International Tripartite Rubber Council (ITRC) dengan Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Secara total, ITRC menyepakati pengurangan ekspor karet alam dari tiga negara itu pada 2009 sebesar 915.000 ton. (Koran Sindo)

2. Pemerintah Sambut Baik Kebijakan The Fed

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik penurunan suku bunga The Fed hingga nol persen karena dapat melonggarkan likuiditas global. Hal itu, kata dia, akan membuat imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN) akan juga membaik.

"Kita berharap pasti positif, kalau Fed turun berarti ada sense terjadi, yakni suatu perileksan (pelonggaran) likuiditas global," kata Menteri Sri ditemui disela rapat kerja di DPR, Rabu (17/12).

Menurutnya, pelonggaran likuiditas global terjadi tidak hanya karena menurunnya The Fed, tetapi juga dukungan bilateral swap (penghapusan) dari Singapura dan Australia kemudian juga dari Meksiko. "Sehingga ada uang dolar yang sudah diletakkan secara langsung, itu akan mengurangi tensi secara persepsi adanya likuiditas yang mengetat," ujar dia.

Dampak dari penurunan ini sudah terasa. Imbal hasil obligasi negara, kata Sri, mulai membaik. Imbal hasil SUN mulai turun hingga dibawah 13 persen. "Waktu kasus Indover yield sempat di atas 15 persen, sekarang 13 persen bahkan lebih rendah," katanya.

Dia juga yakin, penurunan itu akan berlanjut bila data inflasi membaik, yaitu dibawah 11 persen. Penurunan suku bunga The Fed, kata Sri, merupakan reaksi dari pelemahan ekonomi global.

"Sekarang statistik yang keluar itu agak-agak mencekam. Seperti Cina penurunannya luar biasa sekali dari produksi manufaktur, sampai ekspornya. Jepang yang tadinya dianggap masih slightly zero sekarang negatif untuk akhir 2008," tuturnya. (Tempo Interaktif)

3. Bank Dunia Minta PNPM Dilakukan Permanen

Bank Dunia meminta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menjadi program jaring pengaman sosial (JPS) secara permanen.

Senior Social Development Specialist Bank Dunia J Victor Bottini mengatakan, PNPM diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah merealisasikan target pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs) 2015. Karena itu, kata Bottini, PNPM sebaiknya dilaksanakan setelah 2015.

Menurutnya, program tersebut bisa dilaksanakan pemerintah setiap tahun anggaran, meski terdapat pergantian rezim politik dalam setiap lima tahun sekali. "Pembangunan terutama

infrastruktur di desa dan kotakota miskin memerlukan rehabilitasi tiap tahunnya. Tidak bisa hanya mulai membangun dan selesai begitu saja," ujarnya di Jakarta kemarin.

Menurut Bottini, kelayakan PNPM Mandiri untuk dipermanenkan, juga didasarkan efektivitas penggunaan anggaran maupun sasaran pemberdayaannya. Efektivitas penggunaan anggaran, katanya, terlihat dari minimnya tingkat kebocoran dana ketika disalurkan ke masyarakat sasaran.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tingkat kebocoran pelaksanaan PNPM hanya sekitar 0,17% dari total dana yang disalurkan. Begitu juga dengan hasil audit lembaga audit independen Moores Rowland, dengan hasil audit kebocoran di bawah 1%.

Di samping itu, dari efektivitas sasaran pemberdayaannya, Bottini menilai tingkat penyerapan tenaga kerja baru pada kawasan yang memiliki PNPM relatif tinggi. "Dalam ruang lingkup lokal, tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun ketimbang sebelum ada program itu. Satu desa bisa ciptakan rata-rata 60 hari orang kerja," ujarnya.

PNPM Mandiri merupakan program jaring pengaman sosial (JPS) kluster II dengan konsep memberdayakan warga setempat dalam pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan, dan kesehatan. Program ini diluncurkan sejak 2007 sebagai pengganti Program Pengembangan Kecamatan yang pernah ada pada 1998–2007. Pemerintah berencana mempertahankan PNPM Mandiri hingga 2015.

Pada 2009, total anggaran PNPM Mandiri yang mencakup PNPM Inti dan PNPM Penguatan mencapai Rp13,7 triliun. Perinciannya, PNPM Inti Rp10,377.9 triliun dan PNPM Penguatan Rp3,324.2 triliun. Jumlah kecamatan yang akan dicakup pada tahun depan meningkat menjadi seluruhnya, atau 5.720 kecamatan dengan alokasi langsung masyarakat per kecamatan naik menjadi Rp3 miliar dari Rp2 miliar pada 2008.

Pemerintah pernah memproyeksikan PNPM Mandiri akan menekan angka kemiskinan sebesar 10% dan pengangguran 7% pada 2008. Selanjutnya pada 2009, angka kemiskinan diestimasikan turun 8,2% dan pengangguran 5,1%. (Koran Sindo)

4. BKPM: Investor Timteng Target Utama Pemerintah

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi menyatakan, pemerintah Indonesia berharap investor asal Timur Tengah ke Indonesia terus meningkatkan realisasi investasi demi menggerakkan perekonomian dalam negeri. "Hingga Agustus 2008 tahun ini negara-negara Timur Tengah memperoleh "windfall profit" (tambahan keuntungan) dari kenaikan harga minyak. Ini yang kita harapkan dapat mengalir ke tanah air," ujar Lutfi, di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, perolehan dana segar dari "windfall profit" itu bisa mencapai 1,6 triliun dolar AS. "Dengan dana sebesar itu, saya kira mereka (investor Timteng) akan mencari peluang-peluang investasi baru khususnya di Indonesia seperti sektor agro industri, perbankan, dan industri telekomunikasi," ujarnya.

Meski begitu kata Lutfi, pemerintah menyadari untuk memikat minat investor tersebut perlu perbaikan sistem birokrasi seperti masalah perpajakan yang belum mencapai kesepakatan dengan investor Timur Tengah. Akan tetapi, dirinya mengaku belum mengetahui posisi Indonesia dalam daftar urutan negara tujuan investasi ke berapa bagi kalangan investor Timteng.

"Yang pasti, Qatar Telecom sudah masuk membeli saham Indosat, kemudian Emaar Grup investasi di bidang perhotelan senilai 600 juta dolar AS, dan selanjutnya berencana menggelontorkan dana tidak kurang dari 2,5 miliar dolar AS dalam enam tahun pertama," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk wilayah ASEAN, Indonesia dan Myanmar berpotensi dilirik investor Timur Tengah sektor agroindustri. Namun, Myanmar tersandung pertikaian politik, sehingga peluang terbesarnya hanya Indonesia. Sesungguhnya, negara-negara jiran seperti Malaysia dan Singapura, cukup berhasil menarik investasi negeri petrodolar itu.

Meskipun begitu, diakui Lutfi, investor Timteng masih bermain di sektor yang mereka sudah kenal termasuk bidang telekomunikasi dan maskapai penerbangan. Pasalnya, para investor ini awalnya hanya merupakan orang kaya setelah harga minyak melambung, namun mulai tertarik berinvestasi di sejumlah sektor dan telah menjadi industriawan baru.

Untuk itu ujarnya, pemerintah harus segera membenahi sistem investasi terutama menyangkut sistem syariah (bagi hasil), dan pajak investasi yang tidak mengaut sistem bunga (riba).

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI, Toto Daryanto, meminta pemerintah mempermudah regulasi investasi bagi para investor Timteng agar tidak ada hambatan rencana investasinya. Jika

tidak segera bertindak cepat, katanya, Pemerintah Indonesia justru merugi sebab para investor Timteng sedang kelebihan likuiditas, disamping pemerintah sendiri saat ini sedang membutuhkan dukungan bantuan dari lembaga pembiayaan internasional guna menopang perekonomian Indonesia dari terpaan krisis finansial dunia.

"Kami mendesak pemerintah supaya mempermudah masuknya investor para Timteng. Mereka kan sedang kelebihan dana. Jadi, jangan membeda-bedakan investor asing, yang ini boleh masuk yang ini dihambat," ungkap Toto, yang juga Ketua DPP PAN ini.

Investasi 2009 Turun

Sementara itu, Lutfi juga mengatakan bahwa pertumbuhan investasi pada tahun depan dipastikan akan lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2008, menyusul krisis keuangan global yang juga mulai mempengaruhi ekonomi sejumlah negara.

Ia memperkirakan pada tahun depan pertumbuhan masih "double digit" pada kisaran 10,7 - 11,2 persen, sedikit lebih kecil dibanding tahun 2008.

"Realisasi investasi tahun 2008 mencapai 16,5 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 19 persen dibanding tahun 2007. Ini prestasi tersendiri, karena tahun 2007 juga pertumbuhan investasinya sudah rekor," tegas Lutfi. Khusus investasi Amerika Serikat di Indonesia, Lutfi mengatakan selama 5 tahun terakhir posisi investasi negara adidaya tersebut sudah tidak masuk 5 besar, karena AS sudah banyak memindahkan tujuan investasinya dari Indonesia ke sejumlah negara lain.

Menurutnya keluarnya AS dari lima besar investor terbesar di Indonesia, tidak berpengaruh besar. "Kalau kita lihat ya.. sekarang ini kalau bahasa gaulnya, investasi AS itu nggak ngaruh lah...," ujarnya. (Republika Online)

5. RI Belum Siap Terapkan CPKB

Industri kosmetik nasional, terutama yang skala kecil dan menengah, belum siap menerapkan standar cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB).

Akibatnya, rencana penerapan ASEAN Cosmetic Directive yang sedianya terlaksana pada 2010, akan ditunda. Direktur Industri Kimia Hilir Departemen Perindustrian (Depperin) Tony Tanduk mengatakan, penerapan standar CPKB membutuhkan biaya sekurangnya Rp1 miliar untuk setiap perusahaan. Apalagi di tengah kondisi perekonomian saat ini, investasi baru akan sulit dilakukan.

"Industri kosmetik nasional mengaku belum siap menerapkan CPKB tahun ini. Paling tidak (ASEAN Cosmetic Directive) diundur dua tahun," kata dia di Jakarta kemarin. ASEAN Cosmetic Directive merupakan kesepakatan negara-negara anggota ASEAN untuk menerapkan proses manufaktur yang berstandar baik untuk produk jamu dan kosmetik.

Saat ini, kata Tony, terdapat sekitar 700 unit industri kosmetika, di mana sebanyak 85% adalah usaha kecil menengah. Di samping itu, ada sekitar 1.100 industri jamu yang terdiri atas 130 industri kategori besar dan selebihnya skala kecil.

"Dari jumlah total perusahaan yang ada, sebesar 50% sudah menerapkan CPKB," papar Tony. General Manager PT Mustika Ratu Tbk Azfauri Azis menambahkan, memang perlu penyeleksian ketat untuk menetapkan standar CKPB. "Memang diperlukan proses, sehingga membutuhkan waktu untuk persiapannya," jelas dia.

Ekspor Naik

Sementara itu, nilai ekspor PT Mustika Ratu Tbk tahun ini diprediksi melonjak 31% atau sebesar USD6 juta. Azfauri Azis menjelaskan, pengalihan pasar ekspor yang dilakukan perseroan terbukti efektif mendorong penjualan.

"Krisis global memang mempengaruhi pasar ekspor di AS, Eropa, dan Jepang. Kami sudah mengalihkan pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Afrika Selatan, Eropa Timur, dan Timur Tengah," papar dia. Untuk tahun ini, lanjut dia, perseroan bahkan akan membukukan penjualan positif yakni meningkat 26%.

Namun, Azfauri enggan menjelaskan lebih lanjut berapa nilainya. "Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi selama empat tahun terakhir, tapi nilainya saya lupa," kata dia. Ekspor produk kosmetika pada 2006 tercatat sebesar USD79,5 juta, sedangkan pada 2007 mencapai USD106,2 juta yang didominasi oleh produk kecantikan. (Koran Sindo)

C. SOSBUD

:

1. Kualitas Hidup Petani Menurun: Liberalisasi Pertanian Sengsarakan Petani

Kualitas hidup petani padi berlahan sempit semakin menurun sebagai dampak liberalisasi pertanian. Akibatnya, migrasi tenaga kerja usia produktif sektor pertanian tidak terhindarkan. Sekarang tidak ada lagi tanggung jawab dari pemerintah untuk memenuhi hak atas pangan petani.

Di sisi lain, ketergantungan petani terhadap sarana produksi, seperti benih, pupuk, dan obat-obatan, juga semakin kuat.

Demikian hasil studi dampak liberalisasi pertanian terhadap nasib petani padi, khususnya terkait hilangnya hak petani atas beras yang mereka produksi.

Studi dilakukan Ecumenical Advocacy Alliance (EAA) dan Bina Desa, lembaga swadaya masyarakat yang berfokus menangani pengembangan sumber daya manusia pedesaan.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kecil Bina Desa Nanang Hari, Rabu (17/12) di Jakarta, kurangnya tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas pangan petani padi dianggap suatu hal yang biasa. Petani pun hanya bisa bersikap pasrah.

Padahal, negara memiliki kewajiban untuk menghormati usaha tani padi, melindungi, dan apabila petani tidak mampu lagi mengusahakan lahan mereka, negara wajib memenuhi kebutuhan pangan.

"Negara Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005," katanya.

Bentuk kewajiban pemerintah adalah melindungi petani dengan tetap memberikan akses memadai terhadap lahan, permodalan, informasi, sarana produksi, dan meningkatkan pendapatan dengan menaikkan harga jual.

Namun, sejak krisis moneter 1997 sampai sekarang, kecenderungan pemerintah dalam menangani masalah perberasan adalah mengurangi atau mencabut subsidi pertanian, menurunkan bea masuk impor beras, dan melakukan privatisasi Perum Bulog sebagai lembaga penyangga harga beras.

Athena, konsultan EAA, menyatakan, studi EAA yang dilakukan di tiga negara penghasil beras, yakni Indonesia, Honduras, dan Ghana, menunjukkan bahwa impor beras berdampak sangat buruk terhadap kehidupan petani kecil. Akses mereka terhadap pangan berkurang.

Di Honduras, liberalisasi pertanian dimulai pada tahun 1990-an karena tekanan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Setelah itu petani kesulitan mengakses beras yang mereka produksi.

Adapun di Ghana, liberalisasi dimulai pada tahun 1980-an karena tekanan IMF. Di negara tersebut, beras bukan komoditas strategis, melainkan konsumsi masyarakat kota atas beras terus naik.

Sejak liberalisasi dan politik dumping Amerika Serikat tahun 2000, permintaan terhadap beras lokal turun sekitar 75 persen.

Derita petani bertubi-tubi

Di tempat terpisah, guru besar sosial ekonomi dan industri pertanian Universitas Gadjah Mada M Maksu menyatakan, bertubi-tubi penderitaan dibebankan kepada petani di Indonesia.

Hal itu mulai dari kebijakan tata niaga beras yang tidak berpihak kepada petani; hak ekonomi yang sering dicerai, seperti hilangnya pupuk bersubsidi dari pasaran; hingga pemalsuan benih unggul.

Kedaulatan petani atas sumber daya air, lahan, dan teknologi yang diambil alih sampai hak-hak sosial petani terus dipertanyakan, misalnya kualitas beras untuk rakyat miskin yang buruk serta tidak jelasnya pendidikan dan kesehatan gratis.

Oleh karena itu, Nanang mengingatkan perlunya pengorganisasian petani kecil untuk memperjuangkan kepentingan mereka, termasuk meningkatkan nilai tawar. Selain itu, juga perlunya jaringan berbagai pihak di semua level untuk membela petani. (Kompas)

Penerapan sistem pengelolaan air limbah domestik atau sanitasi yang baik di Indonesia masih minim. Tercatat sebagai negara dengan sistem sanitasi terburuk ketiga di Asia Tenggara setelah Laos dan Myanmar.

Menurut data Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2002, tidak kurang dari 400.000 m³ / hari limbah rumah tangga dibuang langsung ke sungai dan tanah, tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu

Direktur Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan, Wan Alkadri mengatakan, sanitasi di Indonesia masih menjadi persoalan yang serius.

"Akibat sanitasi yang buruk terjadi banyak penyakit menular seperti diare, penyakit kulit, infeksi saluran pernafasan akut, Hepatitis A dan E. Bahkan kasus diare hingga menyebabkan kematian pada bayi sebesar 31,4%," ungkapnya pada seminar bertajuk Sanitasi, Air dan Kesejahteraan Masyarakat di Jakarta, Kamis (18/12).

Selain itu data survei sosial ekonomi nasional (susenas) 2007 terlihat masih ada masyarakat buang air besar di sembarang tempat, yang secara nasional sebesar 22,85%, yaitu 9,5% di perkotaan dan 33% di pedesaan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta, Suswono mengatakan pelayanan sanitasi di kota-kota besar di Indonesia pun masih sangat rendah.

"Laporan pencapaian Millenium Development Goals 2007 masyarakat Indonesia yang tidak memiliki sanitasi yang layak sebanyak 30,7% artinya sebanyak 72,5 juta warga Indonesia hidup dengan sanitasi buruk," ungkapnya.

Sanitasi buruk yang terjadi di Indonesia banyak ditemukan di pedesaan yaitu 40%, sementara di perkotaan 19%. Oleh karena itu DPU merasa perlu untuk melaksanakan program pembangunan sanitasi.

"DPU menarget perbaikan sanitasi dalam waktu 11 tahun. dua tahun pertama kami siapkan untuk sosialisasi, tahun berikutnya adalah pematapan dan pematangan," imbuhnya.

Pembangunan sanitasi di Indonesia mencakup dua sisi yaitu pembangunan secara teknis dan nonteknis. Pembangunan secara teknis yaitu penyediaan infrastruktur dan teknologi sanitasi sedangkan nonteknis yaitu perubahan budaya dan perilaku masyarakat yang buruk.

Cara yang ditempuh antara lain dengan kegiatan komunikasi dengan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan sanitasi dan kebersihan, pentingnya menjaga sumber air bersih dan mempunyai prasarana sanitasi yang baik.

Dari sisi pembangunan teknis, selain penyelesaian pembangunan tahap satu Denpasar Sewerage Development Program (DSDP), Departemen PU telah menyelesaikan pembenahan sektor air limbah di 297 kabupaten/kota dengan pembangunan pelayanan air limbah terpusat.

Sementara itu, pembenahan di sektor persampahan mencapai 385 kabupaten/kota dan sektor drainase telah menyelesaikan 4.754 hektar.

Tahun 2008 telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai tahun Sanitasi Internasional (Internasional Year of Sanitation / IyoS 2008). Dengan tujuan utama mendorong komunitas global untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) bidang sanitasi melalui advokasi, komunikasi, dialog, dan peningkatan hubungan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi.(Republika Online)

D. HANKAM : Tidak Ada

E. HUKUM :

1. RUU Penerbangan Disetujui DPR: Maskapai harus Mempunyai Lima Pesawat

Rapat Paripurna DPR, Rabu (17/12), menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Penerbangan menjadi undang-undang. Semula UU Penerbangan akan disahkan pada November 2008. UU Penerbangan yang baru ini mengatur lebih ketat aspek penerbangan. Tujuannya, meningkatkan keselamatan.

Dalam UU Penerbangan, pemegang izin usaha angkutan udara, misalnya, wajib memiliki minimal lima pesawat udara dan menyewa lima pesawat udara.

"Persyaratan keselamatan penerbangan tinggi. Bila tak mampu (membeli pesawat), maskapai dapat merger," kata Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal, Rabu (17/12) di Jakarta.

Sebelum UU baru disahkan, berdasarkan Peraturan Menhub Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, untuk mendapat izin usaha, maskapai wajib mempunyai minimal dua pesawat dan menyewa tiga pesawat.

Menurut Dirjen Perhubungan Udara Dephub Budhi M Suyitno, seluruh maskapai yang beroperasi saat ini berkomitmen untuk memenuhi jumlah pesawat dalam tiga tahun sebagaimana amanat UU Penerbangan.

"Kini ada 17 maskapai, di mana 12 maskapai berarmada di bawah 10 pesawat," ujar dia. Syarat kepemilikan pesawat yang diperbanyak hanyalah satu materi dalam UU baru yang terdiri dari 24 bab dan 466 pasal.

Ketentuan krusial lain dalam UU baru ini adalah keharusan bagi maskapai menyerahkan laporan kinerja keuangan yang diaudit ke Menhub (Pasal 118 Ayat 1 huruf g).

Berdasarkan laporan keuangan itu, mengacu praktik di Amerika, dapat dianalisis kemampuan maskapai dalam menyediakan standar minimum keselamatan.

UU baru juga menetapkan pembentukan komite nasional keamanan penerbangan (Pasal 323). Ini dilakukan untuk menginvestigasi kecelakaan pesawat udara sipil (Pasal 357).

Larangan terbang

Terkait larangan terbang ke Eropa, Jusman menegaskan, UU baru ini segera diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris lalu dikirim ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

"Setidaknya 18 temuan ICAO telah terjawab dengan UU ini. Bila Komisi Eropa masih juga melarang terbang, larangan itu lebih bersifat mendiskriminasi," ujar Jusman.

Budhi mengatakan, Komisi Eropa akan bersidang bulan Maret 2009. Dia berharap pada bulan itu, larangan terbang ke Eropa sudah dapat dicabut.

Minimal ada lima negara yang akan membantu dalam proses pencabutan larangan terbang, kata Budhi, yakni Jerman, Perancis, Belanda, Inggris, dan Swedia. "Permasalahannya, pencabutan larangan terbang hanya akan disetujui bila ke-27 negara anggota Komisi Eropa beraklamasi mencabutnya," ujar Budhi.

Untuk menjalankan UU baru ini, pemerintah menyiapkan lima rancangan peraturan pemerintah mengenai kebandarudaraan, navigasi penerbangan, pesawat udara, angkutan udara, dan keselamatan penerbangan. UU ini juga mengatur sanksi administratif yang dapat diimplementasikan tanpa menunggu peraturan pelaksanaannya. (Kompas)

2. PENDIDIKAN UU BHP Disahkan di Tengah Kecaman

Meski dihadang demonstrasi besar-besaran dan kecaman luar biasa dari mahasiswa di sejumlah kota, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menjadi undang-undang (UU). Sebanyak 10 fraksi di DPR sepakat mengesahkan UU BHP.

Pengesahan yang berlangsung dalam rapat paripurna itu tidak dihadiri Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo. Pemerintah diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Andi Mattalatta.

Seperti diketahui, pro-kontra menguat dalam proses sidang pengesahan RUU BHP yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. "Apakah rancangan UU tentang Badan Hukum Pendidikan dapat disetujui menjadi UU?" tanya Muhaimin kepada para anggota DPR yang menghadiri rapat itu di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/12).

Bukannya mendapat jawaban, pertanyaan Muhaimin dibalas interupsi dari anggota Fraksi PAN DPR Djoko Susilo. "Kita sudah memutuskan UU yang sangat penting, walau tidak dihadiri oleh Menteri Pendidikan. Sementara di luar sana banyak mahasiswa yang mengamuk. Kita seperti hidup di awang-awang. Seperti tidak terkait dengan realitas. Meski fraksi kami menyetujui, ini harus menjadi catatan buat kita semua," ujar Djoko.

Muhaimin pun menimpali. "Tentu semua catatan menjadi bagian dalam pengesahan ini. Apakah RUU Badan Hukum Pendidikan bisa disetujui menjadi UU?" dia bertanya lagi. Pertanyaan Muhaimin dijawab "setuju" oleh anggota Dewan, serentak.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Prof Anwar Arifin mengatakan, UU BHP diperlukan agar lembaga pendidikan bisa melakukan tindakan hukum.

Karena itu, tutur Anwar, UU itu tidak akan memberatkan siswa serta tidak akan melahirkan kapitalisme dunia pendidikan. "Badan hukum diperlukan agar lembaga pendidikan bisa melakukan tindakan hukum," katanya.

Tindakan hukum itu, ucap Anwar, bisa berbentuk perjanjian kerja sama dengan swasta dan asing, serta penerimaan bantuan dari berbagai pihak. Menurut Anwar, lembaga pendidikan akan mendapatkan dana dalam jumlah besar, seperti bantuan operasional pendidikan dari pemerintah. Pengelolaan dana itu memerlukan status hukum, misalnya untuk membuka rekening sekolah.

Ia mengatakan, UU BHP nantinya juga akan mengatur soal manajemen dan pengelolaan lembaga pendidikan. Diharapkan lembaga pendidikan bisa lebih profesional dalam pelaksanaan program pendidikan dan pengelolaan keuangan.

Di tempat terpisah, anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat H Nurul Qomar mengatakan, RUU BHP tidak akan menjadi alat komersialisasi pendidikan.

Esensi dari RUU itu untuk menciptakan sebuah sistem yang baik bagi dunia pendidikan. "UU Badan Hukum Pendidikan disusun supaya lembaga pendidikan punya sistem yang lebih baik lagi dalam penyelenggaraan pendidikannya. Semangat ini mengacu kepada otonomi daerah, otonomi pendidikan, kampus dan sekolah," katanya.

Qomar juga mengatakan, UU ini dibuat agar lembaga pendidikan bisa bebas bergerak. Karena itu, tidak ada niat sedikit pun dari pemerintah untuk menyengsarakan rakyatnya. "Bahwa ada kontroversi, ada demo, itu semata-mata politisasi terhadap UU itu," katanya.

Menurut Qomar, sebelum disahkan, RUU BHP sudah disosialisasikan ke perguruan tinggi. Forum rektor pun mendukung. Semua menerima dan kondusif. Memang, ada beberapa hal yang menjadi persoalan, tapi sudah diakomodasi.

"Jadi, tidak benar kalau BHP diindikasikan akan membuka suasana kapitalisme pendidikan. Apalagi kalau ada yang menuding dengan BHP pendidikan bisa dijual. Itu salah sama sekali," ujar Qomar.

Dia juga mengatakan, pada tahun 2009 pemerintah sudah memberi beasiswa Rp. 500.000 kepada 400 000 mahasiswa di seluruh Indonesia, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

"Tidak ada niat sedikit pun dari pemerintah untuk menyengsarakan rakyat, UU ini dibangun supaya semua lebih baik, lebih terorganisir. UU Pendidikan sudah ada, UU Dosen sudah ada, sekarang UU untuk lembaganya," katanya.

Pengesahan UU BHP dihadiri sekitar 50 anggota DPR. UU BHP terdiri dari 69 pasal. Pasal yang dipermasalahkan yakni pasal 41 ayat 7 yang berbunyi: "peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orangtua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya".

Ayat 8 berbunyi: "biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 7 yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan menengah berstandar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan pada badan hukum pendidikan pemerintah (BHPP) atau badan hukum pendidikan pemerintah daerah (BHPPD) paling banyak sepertiga dari biaya operasional".

Secara terpisah, Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno mengatakan, UU BHP sama sekali tidak memuat pasal yang me-liberalkan dunia pendidikan. Justru pemerintah akan menanggung seluruh biaya pembangunan dan gaji dosen.

Memang, sebagai badan hukum, perguruan tinggi punya hak menetapkan SPP yang harus dibayar oleh mahasiswa peserta didik. Tapi, besaran pungutan dibatasi paling tinggi 1/3 dari biaya operasional institusi pendidikan bersangkutan.

Di lain pihak, anggota Panitia Kerja RUU BHP Komisi X DPR dari FPKS Aan Rohanah mengatakan, kehadiran UU BHP harus bisa mencegah praktik komersialisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan yang sampai saat ini masih sering terjadi, serta menjamin keberpihakan pendidikan terhadap kalangan miskin dan dhuafa.

Dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, BHP telah mengatur bahwa pendidikan dasar bebas dari pungutan.

Prinsip nirlaba yang menjadi ruh UU BHP ini diharapkan pula bisa mencegah terjadinya praktik komersialisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan.

Segala kekayaan dan pendapatan dalam pengelolaan pendidikan dilakukan secara mandiri, transparan dan akuntabel serta digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan peserta didik, proses pembelajaran, pelaksanaan pendidikan, penelitian serta pengabdian masyarakat.

Aan mengatakan pula bahwa praktik komersialisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan bisa dicegah dengan adanya kewajiban BHP menyediakan pendidikan untuk kalangan yang tidak mampu secara ekonomi.

BHP wajib mengalokasikan beasiswa bagi peserta didik WNI yang kurang mampu secara ekonomi atau siswa dengan potensi akademik tinggi minimal 20 persen dari jumlah seluruh peserta didik.

Di lain pihak, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Fasli Jalal saat dimintai komentarnya seputar kecaman mahasiswa yang menolak pengesahan RUU BHP mengatakan, aksi demo mahasiswa merupakan hal yang wajar di tengah euforia demokrasi.

"Itu menunjukkan bahwa masyarakat kita berdemokrasi. Saya sudah berbicara dengan tiga mahasiswa dari ITB. Tampaknya mereka mengerti bahwa UU BHP perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia," kata Fasli Jalal saat dihubungi *Suara Karya* via telepon, di Jakarta, kemarin.

Menurut Fasli, tuntutan mahasiswa itu mustahil dituruti, karena pada Pasal 41 UU BHP telah ditegaskan bahwa peserta didik harus ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, orangtua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya.(Suara Karya)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. Enam Menlu Dipastikan Hadir pada CTI Summit di Manado

Sebanyak enam menteri luar negeri (Menlu) dari negara-negara anggota Coral Triangle Initiative (CTI) dipastikan menghadiri CTI Summit yang akan digelar di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), 11-15 Mei 2009.

CTI Summit dilangsungkan bersamaan dengan pelaksanaan World Ocean Conference (WOC) atau konferensi dunia tentang laut di Manado, kata Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, Syamsul Maarif, di Manado, Rabu.

Anggota CTI terdiri dari Indonesia, Filipina, Kepulauan Solomon, Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste.

Acara tersebut juga akan diikuti dua negara peninjau, yakni Amerika Serikat dan Australia.

Sejumlah menlu dan para pemangku kepentingan penyelamatan laut akan menggelar konferensi untuk membahas kerjasama tentang penyelamatan terumbu karang dunia. Sebagai langkah persiapan, katanya, Departemen Kelautan dan Perikanan selaku pelaksana kegiatan CTI Summit di Manado telah melaksanakan pertemuan Komite Koordinasi CTI sebanyak tiga kali, yaitu di Jakarta, Kepulauan Solomon dan Manila, Filipina. (ANTARA)

III. ARTIKEL :

1. Perubahan Iklim dan Kita (Oleh Ivan A Hadar)

Para menteri lingkungan hidup dan keuangan sejumlah negara, termasuk Indonesia, pekan lalu berkumpul di Poznan, Polandia. Mereka membahas langkah mengatasi perubahan iklim.

Pertemuan itu berlangsung di tengah kekhawatiran bahwa krisis keuangan dapat mengesampingkan usaha pemerintah dan industri untuk memerangi pemanasan dunia. Dalam pertemuan tersebut para menteri dan pejabat keuangan dari 40 negara itu mempelajari instrumen fiskal dan nonbujet guna membantu negara-negara mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong efisiensi energi.

Pertemuan para menteri dan pejabat lingkungan hidup dari sekitar 190 negara itu fokus pada cara-cara merumuskan sebuah traktat pengganti Protokol Kyoto dengan tenggat waktu Desember tahun depan. Bagi para pengkritik, Protokol Kyoto yang akan berakhir tahun 2012 tak efektif karena hanya mencakup 30% dari emisi dunia.

Prokol Kyoto juga gagal memasukkan Amerika Serikat (AS) dan China—dua negara penyumbang emisi terbesar di dunia— dan beberapa negara besar ekonomi lain yang akan menambah emisi pada beberapa dekade mendatang. Dengan terpilihnya Barack Obama sebagai presiden, semoga cerita berikut ini adalah bagian dari masa lalu AS.

Sebuah petisi yang diedarkan oleh Oregon Institute of Science and Medicine, Amerika Serikat, pada 17 Mei 1974, bisa dinilai sebagai keengganan AS "membayar" lebih dalam upaya bersama dunia menahan laju pemanasan bumi. Lebih dari 17.000 ilmuwan, dua ribu di antaranya adalah fisikawan, geofisikawan, pakar iklim, meteorologi, dan lingkungan turut menandatangani petisi tersebut. Salah satu kalimat dalam petisi itu menyatakan

"Tidak ada bukti ilmiah bahwa pelepasan karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan gas-gas rumah kaca lainnya mengakibatkan pemanasan akut terhadap temperatur bumi dan kerusakan pada iklim bumi." ***

Berbeda dengan Petisi Oregon, "Human Development Report 2007/2008. Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World" (UNDP, 2008), menegaskan, "Climate change is now a scientifically established fact." Kenyataannya, sejak era industri mutakhir, temperatur bumi

telah meningkat 0.7 derajat Celsius dengan tingkat lonjakan yang semakin cepat, terutama dalam sebuah dunia yang dipenuhi kesenjangan sosialekonomi.

Setidaknya, terdapat lima "key transmission mechanisms" yang disebabkan perubahan iklim dan berpengaruh buruk pada pembangunan manusia. Pertama, produksi pertanian dan ketahanan pangan. Perubahan iklim memengaruhi curah hujan, suhu udara, dan ketersediaan air bagi pertanian di kawasan yang "rawan" (vulnerable).

Indonesia mengalami kemunduran produksi pertanian yang berperan pada melonjaknya angka kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, kebanjiran dan kekurangan air. Pada 2080, sekitar 1.8 miliar penduduk di negara-negara Asia Tengah, Cina Utara, dan sebagian Asia Selatan serta Indonesia akan "kebanjiran" akibat mencairnya es Himalaya. Sistem irigasinya akan amburadul karena sungai-sungainya meluap. Pada saat yang sama, beberapa kawasan mengalami kelangkaan air yang parah.

Ketiga, meningkatnya permukaan laut sebagai penyebab berbagai bencana iklim. Mencairnya permukaan es di kawasan kutub adalah penyebabnya. Peningkatan suhu udara sebesar 3–4 derajat Celsius bisa menyebabkan banjir dan rob. Pulau-pulau kecil di kawasan Pasifik dan Karibia, termasuk di Indonesia, akan mengalami "catastrophic damage".

Keempat, gonjang-ganjing sistem ekologi dan punahnya keragaman hayati. Perubahan iklim telah pula mengubah sistem-sistem ekologi. Separuh sistem terumbu karang dunia, misalnya, mengalami kerusakan akibat pemanasan laut. Begitu pula kerusakan di berbagai ekosistem seperti ice-based ecologies di kawasan kutub dan marine-ecosystem.

Bagi kebanyakan binatang, perubahan iklim ini terlalu pesat. Dengan kenaikan suhu sebesar 3° C, sekitar 20–30 persen spesies daratan bisa mengalami kepunahan. Kelima, ancaman bagi kesehatan manusia. Negara-negara kaya memang telah mempersiapkan sistem kesehatan publik terkait "climate shocks" di masa akan datang, misalnya ketika menghadapi gelombang panas yang "menyerang" Eropa pada 2003. Tidak demikian dengan negara-negara miskin.

Sekitar 220–400 juta jiwa, misalnya, diperkirakan akan tertular Malaria yang saat ini saja korbannya telah berjumlah sekitar satu juta orang per tahun. Begitu pula dengan demam berdarah yang diperkirakan akan semakin buruk akibat perubahan iklim, khususnya di Amerika Selatan dan sebagian Asia Timur/Tenggara. Lima masalah di atas tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan terkait satu sama lain. Semuanya dalam interaksi dengan proses-proses sosial-ekonomi dan ekologi yang mewarnai pembangunan manusia.

Menentukan target bagi mitigasi adalah sebuah langkah awal yang penting. Namun, menerjemahkannya dalam kebijakan (internasional dan nasional) secara politik lebih menantang. Inggris, misalnya, telah mengeluarkan dana untuk bertahan dari bahaya banjir sebesar USD1,2 miliar per tahun.

Di Belanda, masyarakatnya mulai berinvestasi membeli rumah yang bisa mengapung di atas air. Sementara industri pariwisata ski di Swis, berinvestasi membuat mesin pembuat salju. Inicaramasyarakat dan negara kaya mengantisipasi perubahan iklim. Bagaimana dengan negara miskin, bagaimana dengan kita? ***

Secara global, isu perubahan iklim tetap menjadi perhatian utama di tengah perhatian masyarakat dunia terhadap krisis keuangan. "Upaya penanggulangan perubahan iklim turut pula memberi kontribusi upaya keluar dari krisis keuangan," kata Menteri Lingkungan Rahmat Witoelar ketika menyampaikan hasil pertemuan Poznan baru-baru ini.

Sebagai penghasil karbondioksida terbesar ketiga dunia, Indonesia seharusnya telah mengidentifikasi sektor-sektor yang berperan dalam penurunan emisi dan mekanisme pembangunan bersih, serta mengembangkan isu-isu prioritas untuk bernegosiasi dengan negara lain agar tercapai kerja sama saling menguntungkan. Sebagai negara kepulauan dengan 65% penduduk tinggal di wilayah pesisir, pemanasan global yang berdampak pada naiknya permukaan laut harus dilihat sebagai ancaman yang sangat serius bagi Indonesia.

Sementara itu, sebagai negara agraris, produktivitas pertanian negeri ini pun terancam gangguan tak kalah serius akibat dampak perubahan iklim. Untuk periode 2000–2005, Indonesia dinobatkan sebagai juara dunia perusak hutan, karena dalam kurun waktu tersebut hutan kita yang rusak mencapai angka 2% atau sekitar 1,87 juta hektare per tahun. Angka tersebut sama dengan 51 km per hari, atau 300 lapangan bola setiap jam.

Sebagai akibat, bencana lingkungan pun merebak di mana-mana. Perusakan hutan di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, tak jarang masih dianggap sebagai biaya yang harus ditanggung demi pertumbuhan industri. Beberapa tahun terakhir, Departemen Kehutanan (Dephut) lewat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan)

menargetkan rehabilitasi masing-masing 300.000 ha hutan di 29 daerah aliran sungai (DAS) dan 500.000 hektare pada 2003 dan 2004.

Sementara pada tahun-tahun berikutnya, masing-masing 600.000 ha (2005), 700.000 ha (2006) dan 900.000 ha (2007). Namun sejauh ini apa yang ditargetkan belum tercapai. Bahkan di beberapa daerah program ini gagal. Penyebabnya adalah terjadinya penyimpangan anggaran yang mengingatkan kita pada program reboisasi di masa Orde Baru yang juga gagal akibat penyelewengan. Bila berlanjut, ramalan bakal tibanya "kiamat" dalam waktu dekat akan menjadi kenyataan, paling tidak untuk beberapa kawasan di negeri ini. (Koran Sindo)

2. The day the door to China opened wide (by Richard Holbrooke)

The opening with China by Richard Nixon and Henry Kissinger in 1971-1972 is justly remembered as a historic breakthrough. Less famous but of equal importance was the next major step: the establishment of full diplomatic relations between China and the United States.

Without this action, announced by President Jimmy Carter on Dec. 15, 1978, the relationship could not have moved beyond a small, high-level connection with a very limited agenda.

When they left office in 1977, President Gerald Ford and Kissinger left behind an important but incomplete, and unstable, relationship with China. The United States still recognized the government on Taiwan, which called itself (then as now) the Republic of China, as the legitimate and sole government of all of China. Since 1972, Washington and Beijing had maintained small "liaison offices" in each other's capitals, without recognition. Official communications were limited, and two-way trade was less than US\$1 billion a year (today, it is a staggering \$387 billion annually).

Carter took office hoping to normalize relations with China, which would require switching American recognition from Taiwan to Beijing and ending a sacred defense treaty between the United States and Taiwan. Some saw this as a simple acknowledgment of reality; in fact, it was a momentous step that required diplomatic skill and political courage.

A way would have to be found for the United States, while recognizing Beijing, to continue dealing with the authorities on Taiwan without recognizing its claim to represent China; most important, Washington had to retain the right to sell arms to Taipei.

The politics were not simple: There was the famed Taiwan Lobby, one of the most powerful in the United States. Led by "Mr. Conservative," Sen. Barry Goldwater, and the leading contender for the 1980 Republican nomination, Ronald Reagan, it was to fight normalization all the way. (Goldwater eventually took the U.S. government to the Supreme Court to challenge, unsuccessfully, Carter's action; Reagan pledged in the 1980 campaign to partially undo normalization -- then abandoned that position after he was elected.)

The saga unfolded over the first two years of the Carter administration, out of public sight except for two important trips to China -- one by Secretary of State Cyrus Vance, the other by national security adviser Zbigniew Brzezinski (as assistant secretary of state for East Asian and Pacific affairs, I participated in both trips).

Incredibly, those involved in the negotiations managed to keep the work secret. The Chinese demanded a complete severing of all official ties between Taiwan and the United States, including arms sales. Knowing that such a move would provoke an enormous domestic backlash, we looked for a formula that would continue official contacts and arms sales with Taiwan even after we had de-recognized it and terminated the mutual security treaty ratified during the Eisenhower years.

There was no precedent for this in American or international law. With advice from Eisenhower's attorney general, Herbert Brownell, State Department lawyers drafted the Taiwan Relations Act, a groundbreaking law that allowed the United States to conduct official business on Taiwan, including arms sales, without formal government-to-government relations.

The Chinese wanted trade and other benefits of recognition. When we explained to Beijing why special arrangements with Taiwan were necessary in order to recognize the government on the mainland, it balked. In those Cold War days, recognition would benefit both nations, as Beijing was fiercely hostile to the Soviet Union, with whom it had almost gone to war only a few years earlier. But Taiwan remained a huge obstacle.

The breakthrough came in late 1978, carefully timed to follow the midterm elections. Mao Zedong had died in 1976, and the most important factor was probably the emergence of Deng Xiaoping as China's paramount leader. Deng -- who had been forced to wear a dunce cap and

denounce himself during the insanity of the Cultural Revolution -- had achieved the greatest comeback imaginable; in the fall of 1978, he got enough power to cut a deal with Washington.

Beijing would not "agree" to American arms sales or other activities with Taiwan but would proceed with normalization anyway. It was classic Chinese negotiating style: firm on principle, flexible on specifics.

I'm leaving a lot out here, but this was the essence of a very complicated negotiation. In January 1979, Deng made his historic trip to the United States, which began with a private dinner at Brzezinski's house and climaxed with the most sought-after state dinner of the Carter years (also noteworthy for Richard Nixon's first visit to Washington since his resignation; I sat at Nixon's table, and retain a menu everyone signed that night). At Zbig's house, Deng spoke of his dreams for a China he knew he would not live to see. He believed China could leapfrog the years in which the world had passed it by, but only with American support.

He was ready to cooperate on containing the Soviet Union, even agreeing to the installation of secret American intelligence listening posts along the Chinese border to track Soviet missiles. He accurately foresaw a vast exchange of students, modern technology and trade. More than any American official, he anticipated what the opening to China would accomplish.

But even Deng could not imagine all that was to be unleashed by that announcement on this day 30 years ago -- nothing less than the development of the most important bilateral relationship in the world today. (The Jakarta Post)

IV. LAIN-LAIN : T i d a k
Ada
V. EDITORIAL :

1. Sepatu untuk Bush

DELAPAN tahun menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat jelas sebuah kebanggaan bagi Presiden George W Bush. Namun, di akhir masa jabatannya, Presiden Bush justru meninggalkan jejak yang mengecewakan dan memalukan.

Jejak paling nyata ialah kekalahan partai yang dulu mengantar Bush ke kursi di Gedung Putih, Partai Republik, dari pesaingnya, Partai Demokrat. Partai Republik kalah, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilu parlemen. Kandidat calon presiden dari Partai Republik, John McCain, kalah telak dari calon Partai Demokrat, Barack Obama.

Lebih dari itu, Bush mewariskan perekonomian Amerika Serikat yang sedang mengalami resesi. Krisis ekonomi tersebut bermula dari membengkaknya kredit macet di sektor properti, yang kemudian berimbas ke sektor-sektor lainnya.

Sejumlah lembaga keuangan dan asuransi AS pun bangkrut. Begitu juga perusahaan perbankan dan otomotif raksasa AS ikut limbung. Akibatnya, hingga November lalu, sudah setengah juta pekerja terkena PHK. Itu sebabnya, lembaga internasional seperti IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS tahun ini hanya sekitar 1,3% dan minus 0,7% pada 2009.

Kebangkrutan ekonomi AS mau tidak mau telah menggegerkan dunia. Banyak negara ikut terbawa arus resesi. Indonesia juga telah merasakan dampak dari krisis ekonomi yang melanda AS. Harga saham di bursa jatuh dan nilai tukar rupiah melemah. Tidak cuma remuknya ekonomi di dalam negeri yang diwariskan Bush. Di pentas internasional pun pemerintahan Bush meninggalkan sejarah buruk. Perang Irak yang sudah menghabiskan dana US\$500 miliar dan ikut mendorong kebangkrutan ekonomi AS ternyata tidak juga membuahkan kestabilan di 'Negeri Seribu Satu Malam' itu.

Bahkan, ketika mengadakan lawatan perpisahan di Baghdad, Irak, Minggu (14/12) lalu, Bush mengalami insiden ringan tapi memalukan. Presiden Bush dilempari sepatu oleh seorang jurnalis saat jumpa pers bersama PM Irak Nuri al-Maliki.

Bagi seorang presiden dari negara besar, insiden ringan itu jelas sebuah tamparan yang memalukan. Itu penghinaan yang superberat. Di tengah ketatnya pengamanan bagi seorang presiden AS, insiden tersebut masih bisa terjadi.

Peristiwa itu jelas mewakili ungkapan kekecewaan mendalam rakyat Irak. Oleh karena itu, sang pelempar sepatu, Muntazer al-Zaidi, dianggap pahlawan. Ribuan warga Irak turun ke jalan menuntut pembebasan Zaidi, yang kini ditahan aparat keamanan Irak.

Janji Bush menciptakan pemerintahan yang demokratis dan membangkitkan rakyat Irak dari keterpurukan ternyata masih jauh dari kenyataan. Yang terjadi justru sebaliknya. Irak kini tengah menghadapi krisis politik, ekonomi, dan sosial yang dahsyat.

Konflik horizontal dan vertikal terus-menerus terjadi. Kekerasan yang berujung kepada kematian tidak pernah berhenti. Setiap jam tidak kurang belasan orang tewas di Irak. Semua fakta itu muncul setelah Presiden Bush melancarkan invasi dan agresi ke Irak pada 2003.

Itu sebabnya, di ujung masa pemerintahannya, Bush telah mewariskan sejarah dan kinerja yang buruk, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Boleh jadi, insiden pelemparan sepatu itu cermin perlawanan terhadap keangkuhan Bush yang lebih mendengarkan suara dari langit ketimbang suara dari rakyatnya maupun warga dunia. (Media Indonesia)

2. Klan Kennedy dan Nepotisme

Walau pada akhirnya Caroline Bouvier Kennedy terpilih menjadi Senator New York, sejarah politik Dinasti Kennedy masih akan berlanjut.

Caroline Kennedy menginginkan kursi senator yang akan ditinggalkan Hillary Clinton yang akan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam kabinet Obama. Pesaing kuatnya adalah Jaksa Agung Andrew Cuomo, yang juga mewarisi dinasti politik New York— ayahnya, Mario Cuomo, pernah menjadi gubernur.

Keputusan siapa yang menggantikan Hillary Clinton ada di tangan Gubernur New York David Paterson. Dialah satu-satunya yang memiliki otoritas untuk menunjuk pengganti Hillary Clinton.

Saat ini, kehadiran Dinasti Kennedy di panggung politik diwakili Edward Moore Kennedy atau Ted Kennedy yang menjadi Senator (Massachusetts). Ted yang sudah menjadi senator sejak 1962—sering disebut sebagai "Tsar"-nya para anggota Kongres, sangat berwibawa dan berkarisma—kini menderita tumor otak.

Ted pula yang mempertahankan "tradisi" Kennedy bertahan di Senat selama setengah abad. Sementara anak Ted Kennedy, Patrick Joseph Kennedy, menjadi anggota Majelis Rendah dari Rhode Island.

Keinginan Caroline Kennedy, putra kedua mantan presiden ke-35 AS, JF Kennedy, untuk menjadi anggota Senat itu segera menarik perhatian media di AS. Apakah hanya dengan membawa nama "Kennedy" cukup untuk menjadi senator? Apakah di negara yang tidak mengenal aristokrasi, dinasti politik seperti itu masih perlu?

Wajar kalau muncul pertanyaan seperti itu. Selama ini Caroline Kennedy lebih dikenal sebagai ahli hukum yang senang menulis puisi dan buku-kuku kewarganegaraan ketimbang di dunia politik. Apakah itu bukan nepotisme seperti yang terjadi di negeri ini, Indonesia?

Harus diingat, nama "Kennedy" masih bergaung begitu keras di AS dan karismanya juga kuat. Ayah dan pamannya, Robert F Kennedy, tewas dibunuh. Adik lelakinya tewas dalam kecelakaan pesawat.

Nepotisme politik secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian perlakuan istimewa kepada keluarga sendiri dalam posisi kekuasaan politik tertentu. Nepotisme tak hanya menafikan penjenjangan karier politik atas dasar prestasi, kapabilitas, dan rekam jejak dalam perekrutan politik, tetapi bersifat antidemokrasi.

Rasanya Kennedy tidaklah demikian. Mereka tidak sekadar memiliki reputasi, rekam jejak, dan kapabilitas, tetapi juga sebagian memiliki latar belakang pendidikan bidang politik atau hukum yang memadai. Jadi, walaupun terbentuk "dinasti politik" atas dasar garis darah, citra publik mereka cenderung positif dan diterima publik. (Kompas)

Jakarta, 18 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu